

2024, BKKBN DIY Optimistis Angka Stunting Turun

YOGYA (KR) - Penurunan angka stunting sampai saat ini masih menjadi program prioritas bagi sejumlah daerah di Indonesia, termasuk DIY. Sejumlah upaya terus dilakukan oleh berbagai pihak termasuk Pemda DIY maupun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY untuk menurunkan angka stunting. Bahkan BKKBN DIY optimis pada tahun 2024 angka stunting di wilayahnya bisa mencapai target stunting na-

sional di angka 14 persen. Karena berdasarkan survei yang ada angka stunting wilayah DIY ada di angka 16,4 persen. "Saat ini posisi DIY termasuk salah satu dari lima daerah dengan tingkat stunting terendah. Kami optimis dengan adanya percepatan penanggulangan stunting bisa menekan angka kasus dan mencapai target sesuai dengan arahan pusat. Pasalnya berdasarkan survei Kemenkes angka stunting di DIY 16,4 persen. Artinya

tinggal 2,4 persen kita bisa capai target 14 persen," kata Kepala Perwakilan BKKBN DIY Andi Ritamariani di kantornya, Kamis (16/11). Andi mengatakan, komitmen pimpinan daerah mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota di wilayah DIY cukup serius dalam melakukan penanganan stunting. Komitmen itu mulai dari kebijakan sampai implementasi dinilainya punya inovasi masing-masing dalam mempercepat penurunan kasus tersebut. Komitmen dari

Pemda DIY memiliki peran sangat penting dan strategis guna mendukung percepatan penurunan stunting di daerah. "Kami bersyukur semua pimpinan daerah men-

dukung dan punya inovasi masing-masing dalam penanganan stunting. Dari beberapa daerah yang ada paling rendah itu adalah Kota Yogya yaitu 13 persen lebih sedikit," ungkapnya.

Andi menambahkan, manajemen penanganan stunting di DIY dilakukan berdasarkan Perpres 72/2021 yang mengarahkan adanya kelembagaan penanganan mulai dari tingkat pusat

sampai ke tingkat desa atau kelurahan. Selain itu juga ada tim pendamping keluarga, tim audit kasus stunting dan satgas percepatan penanggulangan stunting. (Ria)-d

Banyak Fasilitas, Mudahkan Generasi Muda Belajar Aksara Jawa

YOGYA (KR) - Fasilitas belajar bahasa, sastra dan aksara Jawa di Yogyakarta terus ditingkatkan, untuk mempermudah masyarakat mempelajarinya. Kemudahan ini diharapkan mendorong generasi muda untuk tertarik belajar tentang bahasa, sastra dan aksara Jawa.



KR-Istimewa

Syukron Arif Muttaqin (paling kanan) menyampaikan paparan.

Demikian dikatakan Anggota Komisi D DPRD DIY dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syukron Arif Muttaqin dalam acara Sosialisasi Perda DIY Nomor 2 tahun 2021 tentang pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Jawa di Sekretariat Pusat Studi Kajian Aksara Nusantara (Paska Nusantara), beberapa waktu lalu.

Sosialisasi diikuti puluhan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menghadirkan narasumber lain Ahmad Fikri AF (pegiat aksara Jawa Hanacaraka) dan Wakil

Dekan Bidang Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Prof Dr Imam Machali.

Menurut Syukron, mahasiswa Yogyakarta sangat perlu memiliki wawasan tambahan terkait bahasa dan aksara Jawa. Saat ini sudah ada platform digital terkait aksara Jawa. Selain itu banyak lembaga menggunakan aksara Jawa di logo atau kop suratnya. "Mahasiswa bisa memanfaatkan kemudahan-kemudahan ini untuk bela-

jar bahasa, sastra dan aksara Jawa," ujarnya.

Prof Dr Imam Machali mengatakan, mahasiswa yang berada di Yogya akan memiliki nilai lebih ketika ikut menambah wawasan terkait sastra maupun aksara Jawa. Saat ini telah dibentuk Pusat Studi Kajian Aksara Nusantara (Paska Nusantara) di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.

"Ini bisa menjadi salah satu media untuk mempelajari aksara Jawa," katanya. (Dev)-d

JANGAN JADIKAN MASYARAKAT OBJEK KEGIATAN Akomodir Kegiatan Nonfisik di Wilayah

YOGYA (KR) - Usulan program yang ditampung melalui disyuarah perencanaan pembangunan (musrenbang) masih banyak yang mengedepankan kegiatan fisik. Padahal kegiatan sosial kemasyarakatan yang sifatnya nonfisik juga tidak kalah penting dan selayaknya diakomodir oleh pemerintah. Hal ini agar masyarakat tidak selamanya harus kerja bakti untuk mengadakan sebuah kegiatan.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Yogya Marwoto Hadi, berharap kalangan kemantren dan kelurahan bisa turut mendampingi dan mengarahkan ketika musrenbang di tingkat bawah digelar. "Program fisik itu boleh, tetapi kegiatan yang nonfisik juga jangan dikesampingkan. Itu juga harus diarahkan supaya masuk dalam musrenbang dan akhirnya mampu difasilitasi oleh negara," urainya.

Kegiatan nonfisik yang digelar oleh elemen masyarakat baik kaum muda, pengurus kampung, tingkat RT dan RW justru menjadi hal strategis dalam membangun ketahanan sosial. Jika selama ini warga harus patungan atau merogoh dompet pribadi untuk membiayai setiap kegiatan di wilayah, maka kehadiran ne-



KR-Istimewa

gara patut dipertanyakan. Apalagi itu berkaitan dengan ketahanan sosial. Pasalnya, kegiatan yang digelar oleh masyarakat dan untuk masyarakat akan memperkuat interaksi sosial serta ketahanan sosial pun bakal terajut.

Oleh karena itu, Marwoto yang duduk sebagai Sekretaris Komisi A ini berharap agar kegiatan nonfisik juga mendapatkan porsi dalam usulan yang disampaikan melalui musrenbang. Selain itu juga jangan hanya menjadikan masyarakat sebagai objek kegiatan. "Sekali atau dua kali boleh lah patungan untuk membiayai kegiatan, tapi jangan seterusnya seperti itu karena akan membebani masyarakat.

Padahal pemerintah sebenarnya mampu mengakomodasi," tandasnya.

Selain itu, dirinya juga mengusulkan supaya kegiatan masyarakat yang berbasis budaya untuk mengakses dana keistimewaan (danais). Pasalnya jika mengandalkan APBD Kota Yogya dikhawatirkan belum mampu mengakomodir seluruhnya. Apalagi kemantren dan kelurahan bagian dari keistimewaan sehingga memiliki peluang dalam mengakses danais. (Dhi)-d

MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN DPRD KOTA YOGYAKARTA

BADAN ANGGARAN DPRD KOTA YOGYAKARTA

Dorong RAPBD Kota Yogya 2024 Tembus Rp 2 Triliun

YOGYA (KR) - Memasuki akhir tahun yang bersamaan dengan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogya 2024, Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta harus menjalankan fungsinya secara lebih maksimal. Hal ini lantaran alat kelengkapan dewan yang memegang kendali pembahasan anggaran tersebut mendorong agar RAPBD Kota Yogya 2024 bisa menembus Rp 2 triliun.

Selama ini APBD di Kota Yogya belum pernah mencapai angka di atas Rp 2 triliun. Oleh karena itu jika pada tahun depan mampu terealisasi maka menjadi torehan prestasi tersendiri. "Anggaran yang dirancang untuk tahun depan memang Rp 2 triliun lebih sedikit. Pembahasan sekarang masih dinamis tetapi harapan kami bisa mencapai itu. Ini juga berkat doa restu seluruh warga masyarakat Kota Yogya sehingga kita bisa alokasikan anggaran di atas Rp 2 triliun," urai Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta H Danang Rudiymoko.

Badan Anggaran menjadi penentu dalam proses penganggaran yang dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hal itu juga selaras dengan fungsi dewan dalam aspek budgeting, sehingga kedudukan Badan Anggaran sebagai alat kelengkapan dewan pun sangat vital. Tak heran jika total anggota Badan Anggaran mencapai separuh dari jumlah anggota dewan di Kota Yogya. Pimpinannya juga melekat atau ex officio Pimpinan Dewan, yakni Danang Rudiymoko sebagai ketua, serta HM Fursan dan Dhian Novitasari sebagai wakil ketua.

Danang menyampaikan proses pembahasan RAPBD Kota Yogya 2024 sejauh ini masih cukup dinamis. Alokasi yang sudah direncanakan sebesar Rp 2 triliun itu pun belum mengakomodir adanya kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan tunjangan ASN ham-



H Danang Rudiymoko

pir mencapai delapan persen. Di sisi lain, defisit anggaran yang masih perlu pencermatan kembali juga sangat pe-lik. Pasalnya sejauh ini total defisit anggaran berkisar antara tujuh persen. Padahal idealnya dengan kemampuan fiskal di Kota Yogya setidaknya defisit anggaran tidak sampai lima persen. "Kami rencanakan defisit di tahun depan 4,5 persen. Ini yang masih terjadi dinamika pembahasan untuk penyesuaian anggarannya," jelasnya.

Peningkatan pendapatan yang di-



HM Fursan SE

rencanakan pada tahun depan juga tidak semata mengandalkan kucuran dana dari pusat, melainkan justru optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari sektor pajak, retribusi maupun pendapatan lain-lain yang sah. Optimalisasi PAD juga bukan dengan menaikkan tarif yang dipungut dari masyarakat melainkan hasil dari intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Seperti potensi meningkatnya jumlah wisatawan yang bisa berimbas pada penambahan penerimaan pajak



Dhian Novitasari

sektor hotel, restoran maupun hiburan. Sehingga harapannya wajib pajak mampu tertib menunaikan kewajibannya tanpa merasa terbebani.

Oleh karena itu diharapkan ada ceruk baru untuk mendongkrak PAD. Di samping itu celah atau potensi kebocoran pajak harus terus diminimalisir. Langkah lain untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja ialah efisiensi pengeluaran. Hal ini pun secara konsisten telah dilakukan di internal DPRD Kota Yogya.



KR-Ardhi Wahdan

Koordinasi rutin jajaran Pimpinan Dewan sekaligus pimpinan Badan Anggaran.

Sebagai contoh dalam menjalankan fungsi legislasi, pencarian data primer lebih mengedepankan peraturan yang telah ada. Ketika harus studi banding ke daerah lain, dipilih daerah yang betul-betul sudah lebih maju dalam rangka pembentukan perundangan.

Selain itu, daerah lain yang memiliki potensi PAD yang sama dengan Kota Yogya juga perlu dipelajari. Terutama dalam menggali inovasi pendapatan. Hal lain yang tidak kalah penting ialah potensi kerja sama pariwisata antar daerah yang dilindungi dengan peraturan daerah. "Hal ini yang perlu kita implementasikan sampai akhir periode," tandas Danang.

Di samping itu, tingginya pendapatan juga akan selaras dengan peningkatan jumlah belanja. Terutama belanja yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Danang mengaku, sektor belanja yang perlu mendapatkan prioritas di tahun depan ialah pembangunan di wilayah serta kelanjutan penanganan sampah. Dua sektor tersebut dinilai merupakan kebutuhan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

"Pembangunan di wilayah berkaitan dengan meningkatkan daya saing di setiap wilayah. Sedangkan penanganan sampah harapan kita tahun depan sudah tuntas supaya tiap tahun tidak terulang terus," katanya.

Sementara menyangkut dukungan anggaran untuk Pemilu 2024, menurut Danang, sudah berhasil diakomodasi melalui APBD 2023. Hal ini didasari adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengamankan penyediaan anggaran untuk kepentingan pemilu serentak 2024. Total yang dialokasikan oleh Pemkot Yogya mencapai Rp 44 miliar untuk mendukung kebutuhan KPU dan Bawaslu. Pencairannya bahkan sudah dilakukan dalam satu tahap menggunakan alokasi silpa yang telah tersedia. (Dhi)-d